

BAB II FEMINISME, FEMINISME POSMODERN, DAN KONSEP 'TATANAN SIMBOLIK' JACQUES LACAN

2.1 Feminisme

Feminisme yang berasal dari bahasa latin *femina* (perempuan), mulai berkembang pasca gerakan Revolusi Perancis, sekitar tahun 1830. Kata '*feminist*' pada mulanya digunakan bagi laki-laki dan perempuan yang menghormati nilai-nilai dan hak-hak perempuan. Menurut Busman (2002), *feminisme* merupakan suatu pemikiran, sedangkan *feminis* merupakan kata sifat atau seseorang yang mempunyai wawasan feminis. Sedangkan definisi feminisme menurut *Japanese World Encyclopedia* (1967) diterjemahkan sebagai 'hak-hak perempuan' dan 'kesetaraan'.

Diarsi (1994), mengemukakan bahwa feminisme memiliki akar sejarah yang tidak berdiri sendiri¹¹. Gerakan feminisme muncul karena adanya persoalan-persoalan, misalnya; di Perancis feminisme muncul bersamaan dengan revolusi Perancis, dengan mengutamakan masalah hak politik bagi kaum perempuan, khususnya hak untuk mendapatkan kursi di Parlemen. Di Amerika, gerakan

¹¹ Selama ini, gerakan perempuan telah berupaya untuk mengubah pandangan dan cara hidup kaum perempuan. Feminisme tumbuh dan berkembang melalui proses yang cukup panjang. Ditandai dengan Gelombang Pertama feminisme di Amerika Serikat, yang timbul dari pergulatan gerakan abolisionis di tahun 1830-an, dan memuncak selama era reformasi sosial di tahun 1890-an. Feminisme Gelombang Pertama sendiri dinyatakan berakhir pada tahun 1920-an. Di era kontemporer feminisme Gelombang Kedua mencuat dari ketidakpuasan sosial umum di tahun 1960-an. Gerakan ini telah berlangsung di negara Barat seperti AS, dan telah melahirkan perubahan yang luar biasa dalam organisasi keluarga, kerja dan gender. Istilah feminisme Gelombang Kedua ini diperkenalkan oleh Marsha Weinman Lear untuk merujuk pada pembentukan kelompok-kelompok pembebasan perempuan di Amerika, Inggris dan Jerman pada akhir tahun 1960-an, yang kecewa terhadap politik Hak-Hak Sipil (*Civil Rights*), gerakan antiperang dan gerakan Kaum Pelajar untuk Masyarakat Demokratis (*Students for a Democratic Society*). Gelombang Kedua lebih menitikberatkan pada kesetaraan rasial. Sejak tahun 1970-an, Gelombang Kedua berkomitmen untuk memperkecil perbedaan antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan perspektif yang berpusat pada perempuan, seperti kesetaraan dalam pekerjaan dan upah, kebebasan seksual, hak bereproduksi, dan kesetaraan dalam representasi politik (Brooks, 1997: 311-322). Gerakan kebebasan perempuan di Amerika pada tahun 1960-1970an juga berdampak pada gerakan perempuan di Jepang, seperti halnya di negara-negara lainnya (misal; Australia) (Tipton, 2000: 208).

feminisme menuntut hak untuk mendapat pendidikan ---seperti hak untuk bersekolah-- dan memberontak terhadap kungkungan gereja.

Feminisme bukanlah suatu ideologi yang monolitik, tidak memiliki pikiran yang sama. Feminisme juga mengalami perkembangan sesuai dengan sejarah, dan memiliki ideologi yang berbeda-beda sesuai konteks serta budaya yang melatari perkembangannya. Oleh sebab itu, definisi feminisme itu sendiri dapat berubah atau berbeda, sesuai dengan latar belakang sejarah dan budaya yang mempengaruhinya.

Pada dasarnya, gerakan feminisme muncul karena adanya subordinasi perempuan atas laki-laki. Menurut *National Organization for Women* ---disingkat NOW; Organisasi Nasional untuk Perempuan---, subordinasi perempuan berakar dari serangkaian hambatan berdasarkan adat kebiasaan dan hambatan hukum, yang membatasi masuknya dan keberhasilan perempuan pada apa yang disebut dunia publik (Tong, 1998: 2). Sebagian besar feminis Barat beranggapan bahwa studi mengenai masyarakat selama ini masih berpegang pada pandangan laki-laki atau didominasi laki-laki. Hal ini melahirkan struktur patriarki¹² pada sebagian besar negara-negara di dunia seperti di kawasan Timur Tengah, Asia, termasuk di Jepang.

Menurut Mill (1869), kesenjangan intelektual antara laki-laki dan perempuan disebabkan karena laki-laki mempunyai kesempatan yang lebih luas daripada perempuan. Pada dasarnya, laki-laki tidak superior secara intelektual dari perempuan, tetapi kondisi masyarakat yang menyebabkan seorang perempuan terhambat dalam perkembangan intelektualnya. Masyarakat dikondisikan untuk menerima perempuan sebagai pihak inferior, dan hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Perempuan dikondisikan untuk hidup bagi orang lain. Mill (1869) juga mengemukakan bahwa perempuan sebenarnya adalah subjek dan bukan objek, sebagaimana yang dilabelkan masyarakat terhadap perempuan (Busman, 2002: 77).

Di dunia Barat pun, buku-buku, kisah, maupun pengalaman-pengalaman manusia hampir seluruhnya ditulis oleh laki-laki. Sejarah yang didominasi tulisan laki-laki tersebut memang di-klaim sebagai karya yang objektif dan universal.

¹² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988), patriarki merupakan sistem masyarakat yang didominasi kaum laki-laki.

Namun, pandangan feminis menganggap penting untuk mengikutsertakan pandangan para perempuan untuk menghasilkan persepsi yang dapat dilegitimasi sebagai persetujuan yang universal dan objektif¹³.

Bagi para feminis di era modern ini, hal pertama dan paling mendasar dalam emansipasi adalah memberikan diri kita sendiri otoritas, sebagai pemilik sudut pandang, dan menyelesaikan tindakan tersebut dengan menemukan persetujuan di dalam pengalaman dan persepsi tentang perempuan (Jaggar, 1993: 104-105).

Patut digarisbawahi, bahwa yang diperjuangkan kaum feminis bukanlah untuk menyamai laki-laki dalam arti biologis, psikologis dan sosiologis, melainkan untuk memungkinkan perempuan bertindak atas pilihan bebas dan sadar sebagaimana dimiliki kaum laki-laki. Jika pada akhirnya perempuan tersebut memilih peran tradisionalnya, atau malah peran baru yang tidak sesuai dengan peran tradisionalnya, hal tersebut bukanlah menjadi persoalan. Yang penting adalah bahwa perempuan mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan dan putusannya sendiri. Sesungguhnya, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan dengan serasi dan seimbang, sehingga penindasan antara satu dan lainnya semestinya tidak terjadi.

2.1.1 Baragam Paradigma dalam Feminisme

Feminisme memiliki berbagai latar belakang seperti sosial, budaya agama, ras, etnis, ekonomi dan pendidikan, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa feminisme bersifat universal dan dapat berdiri sendiri.

Keragaman pemikiran feminis, seperti yang dituliskan oleh Tong dalam bukunya *Feminist Thought* (1998) dapat diklasifikasikan menjadi;

(1) Feminisme liberal; memberi penekanan terhadap pentingnya ‘kebebasan’ bagi perempuan. Sesuai konteks zaman, feminisme liberal pada abad ke-18, memperjuangkan pendidikan yang setara. Abad ke-19, memperjuangkan hak politik

¹³ Sayangnya, para filsuf maupun ilmuwan sekalipun banyak mengeluarkan teori yang membenarkan alasan mengapa perempuan inferior. Aristoteles misalnya, mengatakan bahwa perempuan itu setengah manusia, dikategorikan sebagai anak-anak, belum dewasa sehingga tidak mungkin menjadi pemimpin. Demikian halnya Sigmund Freud yang mengatakan bahwa perempuan secara psikologis tidak matang, karena mempunyai kecemburuan terhadap penis (*penis envy*) (Busman D.S., 2002: 2).

dan kesempatan ekonomi yang setara. Sedangkan pada abad ke-20, memperjuangkan kesempatan ekonomi serta kebebasan sipil bagi perempuan. (2) Feminisme radikal; menantang konsep patriarki yang berawal dari sistem seks dan gender. Patriarki dianggap sebagai suatu pengaturan yang digunakan masyarakat untuk mentransformasikan seksualitas biologis ke dalam produk kegiatan manusia. Hal tersebut menyebabkan ketertindasan dan keterbelakangan perempuan sehingga harus dirombak sampai ke akar-akarnya. Inti pemikiran feminisme radikal adalah gagasan bahwa apa yang bersifat seksual bersifat politik, dan hubungan perempuan dan laki-laki merupakan pola hubungan kekuasaan. (3) Feminisme marxis dan sosialis; beranggapan bahwa ketertindasan perempuan bukanlah hasil dari tindakan individu, melainkan produk dari struktur politik, sosial, dan ekonomi tempat seorang individu hidup. Feminisme marxis lebih melihat kepada sistem kelas daripada seksualitas, sedangkan feminisme sosialis lebih melihat kapitalisme dan patriarki. (4) Feminisme psikoanalisa dan gender; menekankan fungsi seksual sebagai faktor penting dalam pengembangan relasi gender. Ketertindasan berakar pada perbedaan biologis yang menyebabkan perbedaan psikis. Ketimpangan gender muncul dari pengalaman masa kanak-kanak yang membuat perempuan melihat dirinya sebagai feminin dan laki-laki sebagai maskulin, dan pada saat yang sama menganggap bahwa feminitas lebih rendah dari maskulinitas (5) Feminisme eksistensialis; dikembangkan oleh Simone de Beauvoir dalam bukunya *The Second Sex*. Beauvoir berpendapat bahwa perempuan mengalami ketertindasan karena ke-*otherness*-an mereka. Perempuan dianggap sebagai 'orang lain' yang tidak bebas menentukan dirinya sendiri, sedangkan laki-laki adalah 'diri' atau *self* yang bebas menentukan makna keberadaannya. (6) Feminisme multikultural dan global; lahir karena perspektif feminisme yang ada sebelumnya dianggap bias karena tidak mengakomodasi seluruh realitas perempuan. Kondisi dan situasi perempuan di semua tempat berbeda hingga tidak dapat didekati dengan perspektif yang sama. Misalnya, ketertindasan perempuan kulit hitam di suatu negara sangat mungkin berbeda dengan ketertindasan perempuan kulit putih. Kondisi dan situasi antar bangsa mempengaruhi model pendekatan yang digunakan. (7) Ekofeminisme; lahir karena adanya anggapan bahwa ada hubungan langsung antara

ketertindasan alam dengan ketertindasan perempuan, dan pembebasan yang satu tidak akan berhasil tanpa pembebasan yang lain. Ekofeminisme menilai kenyataan bahwa dengan berbagai ragam perbedaan semestinya tidak ada cara berpikir biner yang menguntungkan satu kelompok saja (8) Feminisme posmodern.

2.2 Feminisme Posmodern atau Posfeminisme

Feminisme posmodern atau posfeminisme, dipandang sebagai jawaban untuk menanggapi kelemahan dari feminisme Gelombang Kedua. Istilah posfeminisme ini dianggap mewakili era 1980-an dan 1990-an; era untuk keluar dari apatisisme politik. Tidak diketahui secara pasti kapan persisnya dan siapa yang pertama kali menggunakan istilah posfeminisme ini. Namun posfeminisme dapat dipandang sebagai 'jalan baru' bagi sebagian perempuan untuk melakukan kritik dari dalam dan dari luar gerakan feminisme. Posfeminisme lebih mengedepankan perpaduan dari peran laki-laki dalam keluarga, dan pekerjaan perempuan yang tidak harus ditujukan untuk membangun keluarga (Brooks, 1997: xii).

Menurut Brooks (1997) posfeminisme tidak berarti anti feminisme, melainkan hanya menantang asumsi-asumsi hegemonik yang dipegang oleh epistemologi feminis Gelombang Kedua yang menganggap penindasan patriarki dan imperialis sebagai pengalaman penindasan yang universal. Pada kenyataannya, perempuan tersebar ke dalam berbagai kelas sosial, ras, etnis, komunitas seksual, subkultur, serta agama, sehingga sudah tentu memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Posfeminisme lebih mengedepankan perbedaan, menekankan pada konsep-konsep pluralistik, dan memusatkan perhatian pada budaya yang dimarginalkan agar mendapatkan tempat di ruang publik. Posfeminisme merupakan suatu kemajuan dari feminisme Gelombang Kedua karena dapat menunjukkan kekhususan historis dan budaya pada pengalaman yang dialami perempuan. Istilah posfeminisme sendiri merupakan hal yang dapat dikatakan baru dan belum mendapat banyak perhatian dari para aktifis maupun penulis, khususnya di Indonesia dimana istilah ini baru muncul kurang dari tiga puluh tahun lalu.

Ketertindasan perempuan, terlahir dari sikap yang bersifat satu arah dari laki-laki. Sikap ini melahirkan suatu pola pemikiran dalam menilai perempuan, yang dalam bahasa filsafat, dikatakan sebagai ‘subjektifitas maskulin’¹⁴. Seperti yang diungkapkan oleh Weedon (1987: 8-9), suatu perspektif teoritis akan berguna bagi feminisme apabila mampu mengakui pentingnya subjektifitas dalam mengangkat makna realitas hidup perempuan. Pengalaman subjektif tidak boleh disangkal, karena cara manusia dalam berusaha memahami kehidupan mereka adalah titik pijak yang penting untuk memahami bagaimana relasi-relasi kuasa membentuk masyarakat. Dalam proses ini, subjektifitas menawarkan pada individu baik perspektif maupun pilihan, dan membuka kemungkinan bagi perubahan politik.

Menurut Tong (1998) feminisme posmodern banyak mengkaji pemikiran eksistensialisme Beauvoir, dekonstruksi Derrida, dan psikoanalisis Jacques Lacan. Tokoh-tokohnya antara lain; Helen Cixou, Luce Irigaray, dan Julia Kristeva.

Dalam bukunya, Tong (1998) mengungkapkan bahwa dengan posisi perempuan sebagai *the other* atau sang Liyan¹⁵, feminisme posmodern melihatnya

¹⁴ Subjektifitas merupakan tataran pola dasar pemikiran yang mempengaruhi individu ketika ia menilai sesuatu dan memahami sesuatu (Stephani Natalia, 2009: 14). Subjektifitas menunjuk pada perspektif seseorang, perasaan-perasaan tertentu, keyakinan, dan keinginan (hasrat). Menurut Solomon (2005), subjektifitas biasanya digunakan untuk menunjukkan opini-opini personal yang tidak dibenarkan, berlawanan dengan pengetahuan dan kepercayaan yang dibenarkan. Dapat dikatakan bahwa subjektifitas dipengaruhi oleh prasangka-prasangka tertentu oleh subjek tertentu. Subjektifitas berkenaan dengan persepsi, argumen, serta penalaran berdasar pada pemikiran sang subjek. Subjek selalu berkaitan dengan sesuatu di luar dirinya, sehingga hal ini membantu kita untuk memahami bagian dalam hidup yang melibatkan orang lain; baik sebagai objek kebutuhan, keinginan, maupun kepentingan. Maskulinitas mempengaruhi berbagai institusi di dalam struktur sosial masyarakat, seperti: hukum-hukum yang berlaku, media, pendidikan, agama, kelompok-kelompok, dan lain-lain. Tiap institusi tersebut berperan sebagai alat untuk memberlangsungkan sistem yang telah ada. Nilai-nilai maskulinitas yang terdapat dalam masyarakat patriarki tertanam sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi masyarakat yang hidup di dalamnya. Sebagai akibatnya, muncul sebuah bentuk ‘keterasingan perempuan’ (Stephani Natalia, 2009: 16). Keterasingan perempuan tertanam di dalam ketidaksadarannya karena ia mendapatkan definisi dirinya dari lingkungan yang dikuasai oleh ‘subjektifitas maskulin’. Munculnya ‘keterasingan’ dalam diri perempuan adalah sebagai bentuk ketidakmampuan perempuan untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang ada, sehingga ia terus hidup dalam ‘keterasingan’ yang bahkan mungkin tidak disadarinya.

¹⁵ Konsep *the Other* atau sang Liyan, dikembangkan oleh Simone de Beauvoir dalam bukunya, *The Second Sex*. Menurut Simone de Beauvoir, idealnya seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan disebut sebagai ‘manusia’, karena sesungguhnya tiap manusia merupakan individu yang berbeda. Terminologi maskulin dan feminin yang digunakan secara simetris hanya merupakan bentuk. Maskulinitas biasanya dijadikan representasi dari positifitas dengan sifat netral, dan digunakan secara

sebagai posisi yang sangat menguntungkan untuk dapat mengamati situasi, menilai norma-norma, dan nilai-nilai yang dipaksakan kultur patriarkal pada semua orang. Kondisi ini juga membuka kemungkinan terjadinya keterbukaan, pluralitas dan perbedaan. Feminisme posmodern beranggapan bahwa melihat yang buruk sebenarnya adalah sesuatu yang baik. Misalnya, bahwa realitas perempuan yang dimarginalkan, ditindas, dan ditolak, membuat perempuan menyadari kondisi sebagai yang 'termarginalkan', membuat perempuan dapat 'melihat' dari sudut pandang yang berbeda. Dengan psikoanalisis Jacques Lacan, feminisme posmodern memanfaatkan konsep 'tatanan simbolik' yang merepresentasikan masyarakat melalui rangkaian tanda, peran, dan ritual yang tidak saling berhubungan. Salah satu yang diperjuangkan feminisme posmodern adalah agar perempuan lebih banyak mendapat kesempatan untuk mengekspresikan diri, serta bebas mengkonstruksikan diri sendiri

general untuk merepresentasikan manusia secara keseluruhan, sedangkan femininitas menjadi representasi dari sifat negatif, yang mendefinisikan kriteria yang terbatas, dan seringkali dikondisikan sebagai 'yang salah', semisal pada pernyataan seorang pria yang berkata "kamu tidak mengerti masalah ini hanya karena kamu adalah seorang perempuan". Maskulinitas laki-laki dianggap sebagai bentuk manusia seutuhnya (yang absolut), sedangkan perempuan memiliki uterus, dan ovarium, sehingga hal ini membatasi perempuan dalam subjektifitasnya sendiri, terpenjara dalam tubuhnya sendiri (Simone de Beauvoir, 2005: 28). Dalam masyarakat primitif, di sebagian besar mitologi kuno, ditemukan ekspresi dualitas yang dinamakan 'Diri' dan 'sang Liyan'. Dualitas ini tidak serta merta mengacu pada pembagian divisi seks, tetapi elemen-elemen feminin ini terlihat dalam analogi-analogi diantaranya; Varuna-Mitra, Uranus-Zeus, Sun-Moon, Siang-Malam, dan dalam berbagai kategori fundamental dari pemikiran manusia. Hal ini menjadi gambaran bahwa suatu pasangan tidak akan tercipta tanpa keberadaan Diri dan sang Liyan. Seperti dalam suatu negara dengan kaum pendatang (imigran); kaum Negro (Afro- Amerika) merupakan bentuk inferior dari kaum rasis Amerika, suku Aborigin merupakan inferior bagi kaum Koloni, buruh merupakan kelas yang lebih rendah dari tuan tanah. Seperti yang dikatakan Hegel, segala sesuatu menjadi jelas karena memiliki lawan, dan subjek menjadi 'subjek' karena memiliki oposisi. Subjek mengatur dirinya sebagai yang esensial, oposisi dari sang Liyan yang tidak esensial atau sang objek (Simone de Beauvoir, 2005: 29). Subjugasi ini hadir bukan karena perempuan merupakan kaum minoritas dalam jumlah, tetapi karena perempuan seringkali dianggap lebih lemah dibanding laki-laki. Perempuan sebagai sang Liyan dalam kasus ini terlihat sebagai suatu yang absolut adalah karena kurangnya fakta-fakta historis yang berasal dari sudut pandang perempuan. Fakta sesungguhnya mengapa perempuan merupakan sang Liyan adalah karena seluruh justifikasi selama ini, dibuat demi dan berdasarkan kepentingan laki-laki (Simone de Beauvoir, 2005: 31). Seseorang tidak dilahirkan, tetapi menjadi perempuan. Bukan secara biologis, psikologis, atau ekonomi yang menjadi determinasi figur perempuan saat ini di masyarakat, tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang memproduksi deskripsi femininitas, dan hanya intervensi orang lain yang dapat menjadikan satu individu sebagai sang Liyan. Feminisme Posmodern memanfaatkan kembali pemahaman Simone de Beauvoir mengenai konsep sang Liyan dan mengambil manfaat dari kondisi tersebut, karena kondisi Liyan memungkinkan perempuan untuk mengkritisi norma, nilai dan praktik-praktik yang dipaksakan oleh kebudayaan dominan. Kondisi Liyan memungkinkan adanya keterbukaan, pluralitas, keragaman dan perbedaan.

seperti yang dilakukan laki-laki. Jadi, kebebasan yang sesungguhnya adalah adanya hak untuk mengkonstruksikan dirinya sendiri sebagaimana manusia seutuhnya.

2.3 Pemikir Posmodern: Jacques Lacan¹⁶

Pengkotak-kotakkan, atau pembagian peran, seringkali terjadi dalam relasi kehidupan antara laki-laki dan perempuan. Pada awalnya, pembagian peran ini dianggap sebagai suatu solusi dari cara menjalankan kehidupan, dan bukan untuk menyatakan bahwa yang satu, bersifat ‘lebih’ dari yang lain. Namun dalam perkembangannya, laki-laki seringkali diidentikkan dengan segala sesuatu yang bersifat ‘lebih’. Maskulinitas laki-laki dianggap sebagai ‘yang kuat, yang besar, yang berkuasa, yang terbuka’, sedangkan femininitas perempuan identik dengan ‘yang tidak berdaya, yang lemah, yang kecil, yang lembut’ dan sebagainya. Menurut Natalia (2009), situasi yang dalam bahasa filsafat disebut dengan ‘oposisi biner’¹⁷ ini pada kenyataannya memang merugikan kaum perempuan, karena perempuan dianggap sebagai subordinat, di bawah kekuasaan laki-laki. Hal ini berlangsung melalui proses

¹⁶ Jacques Marie Emile Lacan dilahirkan pada tanggal 13 April 1901 di Paris, Perancis, dan dibesarkan di tengah keluarga Katolik Borjuis yang taat. Ia menempuh pendidikan kedokteran di Sorbonne sebelum melanjutkan pendidikannya di bidang psikiatri pada tahun 1920-an. Pada tahun 1927, ia memulai pelatihan klinik dan bekerja di rumah sakit *Sainte-Anne's* pada bagian penyakit syaraf, yang dikepalai oleh Profesor Henri Claude. Setahun kemudian, ia meneruskan bekerja di layanan perawatan khusus bersama dengan Clerambault, seorang psikiatris terkenal. Lacan menjadi anggota dan terlibat aktif di beberapa komunitas, seperti; *Societe Neurologique*, *Societe de Psychiatrie*, dan *Societe Clinique de Medecine Mentale* hingga tahun 1932. Pada tahun 1932, Lacan mendapatkan gelar doktornya, dan menjadi anggota *La Societe Psychoanalytique de Paris* (SPP) pada tahun 1934 dan menjadi sosok terkenal yang kontroversial dalam komunitas psikoanalitik internasional. Namun, pada tahun 1962, ia dikeluarkan dari Asosiasi Psikoanalitik Internasional, karena pemikirannya dianggap menyimpang dari praktik psikoanalisa. Selepas itu, pada tahun 1963 ia mendirikan *L'Ecole Francaise de Psychanalyse* yang kemudian menjadi *L'Ecole Freudienne de Paris* (EFP). Esai Lacan yang pertama kali dipublikasikan berjudul “*On the Mirror Detage as Formative of the I*”, yang muncul pertama kali pada tahun 1936. Kumpulan esai penting Lacan dibukukan pada tahun 1966 di dalam *Ecrits: A Selection*. Lacan banyak memberikan seminar-seminar hingga akhir hidupnya. Ia meninggal di Paris pada tanggal 9 September 1981 (Lacan, 1989).

¹⁷ Istilah oposisin biner atau *polar concept* diperkenalkan oleh kaum strukturalis yang menjelaskan mengenai sepasang pengandaian oposisi antara yang satu dan yang lain, yang saling bertentangan dan bertolak belakang. Kaum strukturalis meyakini bahwa oposisi biner berpengaruh besar dalam membentuk dan menyusun kebudayaan manusia (Simon Blackburn, 1994: 291).

yang berabad-abad, dalam berbagai sistem masyarakat yang ada di dunia, termasuk Jepang.

Seperti yang diungkapkan oleh Lacan (1989), perempuan tidak pernah benar-benar masuk ke dalam masyarakat, karena masyarakat yang bersifat patriarkal mendefinisikan perempuan melalui kacamata ‘subjektifitas maskulin’. Melalui berbagai fakta biologis, pengaruh yang kuat dari mitos¹⁸, serta stigmatisasi terhadap perempuan, maka perempuan semakin ter subordinasi ke dalam kultur patriarkal yang melekat pada struktur sosial. Secara sadar maupun tak sadar, perempuan diopresi oleh lingkungannya, bahkan dirinya sendiri (Natalia, 2009: 2).

¹⁸ Mitos memang melahirkan karakter politik yang kuat mengenai perempuan dalam dunia patriarki, seperti asumsi “perempuan yang secara biologis berbeda dengan laki-laki membuatnya terpisah, dan secara esensial, perempuan adalah inferior” (Kate Millet, 2005: 49). Dalam berbagai literatur, mitos, kehidupan primitif serta modern, terlihat pembentukan citra perempuan yang dikendalikan oleh laki-laki. Kejadian khusus seperti menstruasi, sebagai contoh, berakibat terhadap stigma mengenai perempuan dan memiliki akibat besar terhadap ego perempuan. Banyak literatur yang mengulas mengenai tabu menstruasi, bahkan dalam kontemporer *slang*, ada anggapan yang mengatakan bahwa menstruasi adalah ‘kutukan’ (Kate Millet, 2005: 49). Ketidaknyamanan ketika perempuan menjalani periode menstruasi ini lebih bersifat kultural dibanding biologis. Lingkungan patriarki dan kepercayaan terlihat memiliki dampak yang besar terhadap pikiran perempuan mengenai dirinya sendiri. Pada satu sisi, seperti pada sebagian besar patriarki, virginitas atau kesucian perempuan merupakan kebaikan yang misterius karena melambangkan kepemilikan yang absolut. Di sisi lain, hal ini menjadi representasi dari iblis yang tidak diketahui dan berasosiasi dengan darah serta merupakan “sang Liyan” yang menakutkan. Ketakutan ini muncul sebagai akar dari aliensi seksualitas perempuan (Kate Millet, 2005: 50). Contohnya seperti mitos yang berkembang di dunia Barat mengenai kotak Pandora. Mitos ini mengisahkan mengenai dewi kesuburan di Mediterania; Pandora. Dalam kisah Hesiod, Pandora mengenakan kalung (diadem) dan rangkaian bunga, yang berbentuk semua makhluk di darat dan lautan. Hesiod tertarik pada Pandora, lalu memberi Pandora suatu perkenalan terhadap seksualitas, yang akhirnya mengakhiri masa emas dimana “ras laki-laki mendiami bumi dan bebas dari kaum iblis, perburuhan, serta bebas dari segala penyakit”. Pandora merupakan asal muasal “ras perempuan yang terkutuk”, dan laki-laki harus hidup bersamanya (Kate Millet, 2005: 51). Mitos Pandora merupakan salah satu dari mitos Barat yang menjelaskan perempuan melalui seksualitasnya dan posisi perempuan sebagai yang ‘terhukum’ karena dosa-dosa primal-nya ---dosa awal---. Selain mitos Pandora, dalam kisah Adam dan Hawa versi kaum Yahudi ---Adam memanggilnya Hawa karena Hawa merupakan ibu dari segala bentuk kehidupan---, terdapat dua versi mengenai penciptaan Hawa: diciptakan bersamaan dengan Adam, dan diciptakan setelah Adam, dari tulang rusuk Adam. Kisah Adam dan Hawa merupakan sebuah narasi tentang bagaimana manusia dapat terbawa nafsu seksual. Yang menjadi tema utama dalam kisah ini adalah hilangnya keabadian, datangnya kematian, dan pengalaman pertama tentang pengetahuan akan kebaikan dan kejahatan. Pengetahuan (*knowing*) dalam kitab bersinonim dengan seksualitas, dan merupakan produk dari hubungan atau kontak dengan *Phallus*. Dalam kisah ini ‘penis’ dilambangkan sebagai ular, dan Hawa tergoda lalu memakannya, sehingga dapat dikatakan Adam digoda oleh Hawa. Hal ini seolah didesain untuk menyalahkan segala ketidaknyamanan di dunia ini terhadap perempuan. Eden (surga) merupakan dunia tanpa aktifitas dan tenaga, dimana dengan datangnya perempuan dan seksualitasnya, keabadian itu dihancurkan. Hal ini menjadi gambaran tanggung jawab perempuan sebagai makhluk marginal dan menjadi justifikasi dari kondisi subordinat perempuan sebagai akibat dari perannya dalam dosa asal (*original sin*) (Kate Millet, 2005: 52). Hubungan antara perempuan, seks dan dosa mengkonstitusi pola dasar dari patriarki Barat.

Perlu digarisbawahi, bahwa ‘perempuan diopresi oleh lingkungan dan dirinya sendiri’. Secara sadar maupun tak sadar, kultur patriarki yang begitu kuat dalam masyarakat, membentuk pola pikir pada masing-masing individu, termasuk perempuan. Sehingga, sesuai dengan tatanan ‘ideal’ yang dikonstruksi masyarakat dan mengakar kuat dalam ranah ketidaksadaran masing-masing individu, opresi terhadap perempuan terus dilahirkan dan diproduksi kembali dalam masyarakat.

Konsep ‘tatanan simbolik’ Jacques Lacan mengangkat problematika keberadaan ‘tatanan’ yang mendasarkan pada ‘tatanan ayah’, yang mencirikan dominasi subjektifitas maskulin. Menurut Lacan (1989), seseorang harus menginternalisasikan dirinya ke dalam tatanan bahasa ayah, untuk dapat mencapai suatu yang dikatakan optimal atau posisi dan kondisi yang diinginkan oleh seorang individu agar dapat tetap diterima dalam masyarakat. Upaya untuk dapat memasuki ‘tatanan simbolik’ ini melupakan perempuan, yang dianggap tidak mampu untuk menginternalisasi bahasa ayah, yang membuat dirinya pada akhirnya tidak dapat diperhitungkan sama sekali, atau dengan kata lain, perempuan tidak mampu untuk menjadi subjek yang dapat berdiri sendiri seperti halnya laki-laki.

Teori feminis pada tahun 1970-an dipengaruhi secara kuat oleh model psikoanalisis tentang seksualitas dan subjektifitas. Lacan merupakan salah seorang tokoh utama berkebangsaan Perancis yang turut melatari pandangan feminisme 1970-an dan melahirkan konsep-konsep yang menyokong feminisme posmodern.

2.4 Konsep ‘Tatanan Simbolik’ Jacques Lacan

Pemikiran Jacques Lacan menjelaskan keberadaan aturan-aturan simbolis yang maskulin. Ia berargumentasi bahwa bagi seorang anak, untuk dapat berfungsi secara optimal di dalam masyarakat, maka ia harus mempelajari aturan-aturan simbolis ini (Arivia, 2003: 128). Seperti Beauvoir (2005), Lacan juga menyerang gagasan umum mengenai konsep kepengarangan, identitas, dan Diri, melalui konsep sang Liyan.

Gaya Lacan, sebagaimana isi dari tulisannya, telah memiliki pengaruh besar pada penulisan feminisme Perancis. Ketidaksadaran dan seksualitas tidak dipandang

Lacan sebagai sifat dasar atau esensi biologis, tetapi sebagai suatu hasil pembentukan subjek di dalam tatanan imajiner dan simbolik (Brooks, 1997: 106). Teori psikoanalisis Lacan, mengembangkan suatu konsep dengan mengelaborasi tataran ketidaksadaran manusia, yang berperan penting dalam perkembangan pembentukan subjektivitas individu. Ia kemudian menghadirkan konsep 'tatanan simbolik', yang hidup di area ketidaksadaran manusia.

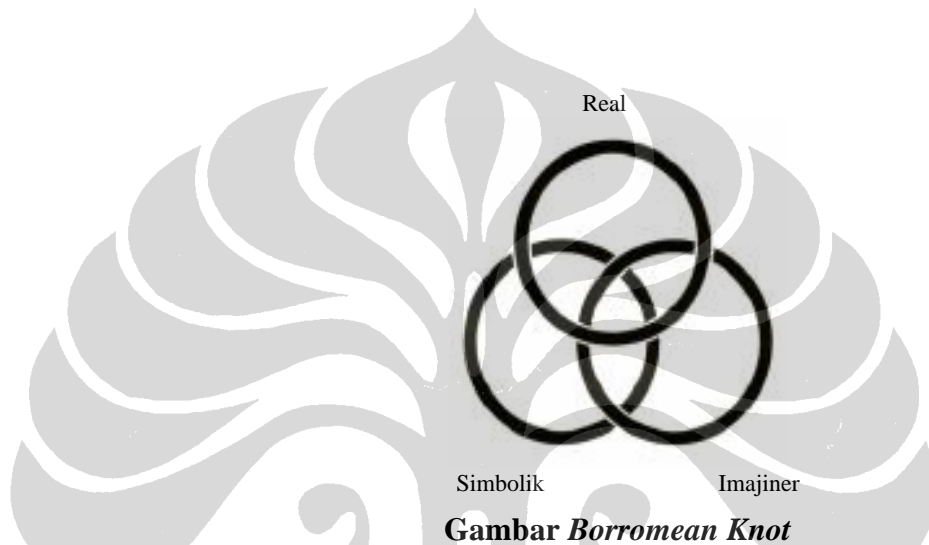
Lacan berpendapat bahwa setiap masyarakat diatur oleh rangkaian tanda, peran dan ritual yang tidak saling berhubungan. Lacan memberi istilah pada rangkaian ini sebagai 'tatanan simbolik' (Lacan, 1989: 64-65). Untuk berfungsi secara memadai di dalam masyarakat, seorang anak harus menginternalisasi 'tatanan simbolik'. Semakin banyak seorang anak tunduk terhadap aturan dalam masyarakat, semakin banyak aturan yang terpatrit dalam ketidaksadarannya. Dengan kata lain 'tatanan simbolik' mengatur masyarakat melalui pengaturan terhadap individu, dengan berbicara dalam bahasa dari 'tatanan simbolik' tersebut dan menginternalisasikan peran gender dan kelas yang terkandung di dalamnya (Tong, 1998: 287-288).

Istilah 'simbolik' digunakan untuk menjelaskan mengenai 'ranah yang membentuk hukum sosial, bahasa' atau 'ranah tatanan sosial'. Tatanan ini diatur oleh yang disebut Lacan sebagai 'sang Liyan' (*The Other*). Lacan kemudian menjelaskan bahwa 'sang Liyan' diwujudkan di dalam pengalaman manusia dalam figur simbolik. Otoritas ayah, menjadi figur yang dominan dalam ranah tatanan sosial, dimana hukum di dalamnya diatur berdasarkan hukum ayah, sehingga perempuan menempati ruang 'di luar tatanan simbolik' atau dimarginalkan (Grosz, 1990: 72).

Lacan (1989) juga menyatakan bahwa 'tatanan simbolik' adalah sistem hubungan yang sudah ada sebelum kita. Jika manusia ingin menyesuaikan diri dengan tatanan ini, Lacan merujuk pada tiga tahapan, yang dengan perlahan-lahan membuat kita tunduk pada 'tatanan ayah'.

'Tatanan ayah', juga digambarkan melalui teori 'Kompleks Oedipal' Lacan, yang mengadaptasi Teori Kompleks Oedipal dari Sigmund Freud. Lacan mengembangkan pemikiran Freud dengan menarik konsep Kompleks Oedipal ke

dalam ranah linguistik dan kultural. Tiga konsep dalam ranah ketidaksadaran tersebut berkembang ke dalam tiga ranah perkembangan manusia, yaitu; yang *Real*, Imajiner, dan Simbolik (Natalia, 2009). Tiga ranah ini dapat digambarkan melalui *Borromeian Knot*:



Sumber: <http://images.search.yahoo.com/images/Borromeian.Knot.jpg>

Berikut penjelasan mengenai tiga tahapan dalam ‘Kompleks Oedipal’ yang kemudian berkembang menjadi konsep ‘tatanan simbolik’ Jacques Lacan. Penjelasan ini dipaparkan dalam karya Lacan (1989); *Ecrits: A Selection*.

- Tahap satu: fase Pra-Oedipal (Yang *Real*)

Tahap ini berlangsung dari sang bayi baru lahir hingga berusia 6-18 bulan. Saat lahir, sang bayi digerakkan oleh faktor pemuas kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum, kenyamanan, rasa sakit, dan sebagainya. Berbagai kebutuhan tersebut dipuaskan oleh objek pemuasnya. Namun, sang bayi tidak memahami bahwa ia dan ibunya adalah dua identitas yang berbeda, dan belum memahami bahwa ia dan objek pemuas kebutuhannya bukan merupakan kesatuan. Tidak ada konsep ‘pribadi’ atau ‘diri’ sebagai individu dalam fase ini. Lacan memandang ‘bayi’ masih merupakan satu kesatuan dengan ibunya, dan bahwa kondisi ini harus diatasi agar kebudayaan

dapat terbentuk. Bayi harus dapat memisahkan diri dari sang ibu, agar ia mampu memasuki dunia peradaban sebagai individu yang otonom. Fase ini akan berhenti ketika sang bayi dapat membedakan antara dirinya dan segala sesuatu yang berada di luar dirinya.

- Tahap dua: Fase Imajiner atau Fase Cermin (*Mirror Phase*)

Pada fase ini, konsep tentang ‘diri’ mulai terbentuk dari suatu identifikasi imajiner atas gambaran pantulan ‘diri’ di cermin. Fase ini terbentuk saat bayi berusia 6-18 bulan. Lacan memberi gambaran bahwa pada fase ini, sang bayi diandaikan menghadap sebuah cermin, dan mulai merasa ‘utuh’. Sang bayi seolah dapat memandang bahwa apa yang selama ini ia anggap terbelah-belah (*fragmented body*), menjadi suatu totalitas penglihatan yang menyeluruh. Sang bayi berkembang menjadi anak, seiring dengan pertemuan dirinya dengan ‘identitas pribadi’, bahwa ia berbeda dengan ‘sang Liyan’ atau ibunya.

Bagi Lacan, pantulan ‘aku’ pada fase cermin inilah yang menumbuhkan ‘ego’. Namun, apa yang terbentuk sebagai pencitraan ‘diri’ pada fase cermin ini belum seutuhnya sesuai dengan diri yang sebenarnya. Sang anak akan memahami bahwa sesungguhnya yang terpantul di cermin imajiner tersebut bukanlah ‘diri’ yang sebenarnya, karena gambaran di cermin bukanlah bagian dari diri kita. Pada saat inilah sang anak memperoleh pengetahuan mengenai ‘*otherness*’, atau ‘sang Liyan’. Sehingga dapat dikatakan gagasan tentang ‘diri’ muncul karena adanya ‘sang Liyan’.

Sebelum Kompleks Oedipus ini memasuki fase terpentingnya, sang anak akan mulai memahami suatu intervensi yang mengacaukan hubungan imajiner ini, yakni; figur ayahnya sebagai penanda perbedaan maskulin dan feminin, serta hierarki gender yang akan mengakibatkan ‘diri’ sang anak mengarah pada wilayah yang penuh dengan subjektifitas (Mansfield, 2001: 41)

- Tahap Tiga: Fase Oedipal atau ‘Tatanan Simbolik’

Dari ketiga tahapan yang dikemukakan Lacan, simbolik merupakan fase yang terpenting bagi sang anak. Seorang anak memasuki dunia simbolik ketika ia mulai mengenal gagasan tentang ‘sang Liyan’, dan dirinya yang teridentifikasi dari gambar pantulan di cermin. Pada fase ini, sang anak harus memasuki ‘tatanan simbolik’, yang

menggunakan struktur dan bahasa, dimana di dalamnya ia harus menjadi subjek yang dapat berbicara. Penyebutan kata 'aku' yang pertama kali, menjadi penanda sang anak mulai memasuki fase simbolik.

Di dalam 'tatanan simbolik', segala hal mulai dapat diterima dengan masuk akal. Segala bentuk hubungan hierarki dan pemaknaan diterapkan dalam tatanan ini. Masyarakat berfungsi dan diatur oleh rangkaian tanda, peran dan ritual yang tidak saling berhubungan. Segala bentuk proses sosial dan institusi yang ada, seperti hierarki gender maskulin dominan dan feminin marginal, maupun sistem peraturan hukum tertentu, memiliki dasar dan mereproduksi suatu bentuk atau konsep logika yang sama, yang pada akhirnya dipelajari oleh tiap 'anak' yang terjun ke dalam ranah 'tatanan simbolik'.

Pada fase ketiga ini, hubungan anak dan ibu semakin melemah dengan adanya intervensi sang ayah. Pada fase inilah terjadi suatu perbedaan dalam perkembangan anak laki-laki dan anak perempuan yang kemudian memposisikan laki-laki sebagai Diri yang utuh, sedangkan perempuan dianggap tidak dapat menginternalisasi 'tatanan simbolik' sepenuhnya karena kesamaan anatomi dengan sang ibu. Anak laki-laki dapat menolak identifikasi dengan ibunya, dan mendekatkan diri dengan sang ayah karena kemiripan anatomi tubuh, sehingga dapat menginternalisasi ke dalam tatanan yang dominan (Tong, 1998: 288-289).

Melalui gagasan Kompleks Oedipus tersebut, Lacan menyatakan bahwa ego merupakan hasil dari penanaman narsistik anak-anak di dalam citra pemenuhan kebutuhannya (Grosz, 1990: 73). Lacan memusatkan perkembangan simbolik pada anak laki-laki, sedangkan proses yang terjadi terhadap anak perempuan dianggap tidak jelas. Bagi Lacan, 'ketidaksadaran, hasrat, dan seksualitas bukan merupakan efek sifat dasar, biologi, atau suatu esensi manusia, melainkan sebuah konsekuensi pembentukan subjek manusia oleh simbolik dan imajiner' (Brooks, 1997: 108-109).

Dalam model yang dikemukakan Lacan, seorang bayi tidak dilahirkan sebagai subjek yang kemudian mendapat karakteristik sosial yang pantas, tetapi dia menjadi subjek melalui intervensi sosial. Menurutnya, alat kelamin bukanlah organ, melainkan sebuah 'penanda utama pada tatanan simbolik'. Identitas seksual seorang

subjek merupakan dampak dari posisinya dalam ‘tatanan simbolik’. Identitas maskulin dan feminin tidaklah ‘alamiah’. Lacan menekankan ‘tatanan simbolik’ sebagai struktur yang membentuk identitas masyarakat, seperti penanaman oleh budaya patriarkal (Brooks, 1997: 106-110).

‘Tatanan simbolik’ sesungguhnya memberi gambaran tentang individu dalam masyarakat dimana di dalamnya ia harus hidup dengan ‘sang Liyan’ atau orang selain dirinya, sehingga ia harus tunduk terhadap aturan-aturan dan hukum yang berlaku dimana hal tersebut diatur melalui rangkaian tanda, peran dan ritual yang tidak saling berhubungan.

Dari apa yang dikemukakan oleh Jacques Lacan, dapat disimpulkan bahwa ‘tatanan simbolik’ merupakan tatanan sosial dan budaya yang membentuk identitas gender. ‘Tatanan simbolik’ Lacan tidak terhubung pada penanda atau konsep yang tetap, terkecuali dalam relasinya dengan penanda primer, atau yang disebut Lacan sebagai ‘*phallus*’, yang menjamin struktur patriarkal dari ‘tatanan simbolik’ (Weedon, 1987: 53).

Budaya patriarkal yang muncul di masyarakat merupakan suatu pertalian antara diri, keluarga, dan relasi budaya. Konsep Lacan dapat menunjukkan bagaimana gagasan dasar mengenai *subjek* diartikan sebagai maskulinitas dalam pengertian budaya, dan melahirkan konsep patriarki di berbagai belahan dunia, termasuk Jepang.

2.5 Aplikasi ‘Tatanan Simbolik’ Jacques Lacan dalam Masyarakat Jepang

Menurut konsep ‘tatanan simbolik’ Lacan, masyarakat dibentuk dalam proses yang telah terjadi bahkan sebelum kehadiran kita. Sudah tentu apa yang dihasilkan dalam proses tersebut ---apakah itu aturan, pemikiran, pandangan umum, maupun ketetapan hukum--- adalah suatu hal yang tidak dapat serta merta diubah oleh seseorang atau kelompok tertentu. Rangkaian tanda, peran, serta ritual yang tidak saling berhubungan dalam ‘tatanan simbolik’, menurut Lacan, cenderung mengacu pada ‘tatanan ayah’, atau dapat dikatakan memiliki sifat ‘patriarkal’. Untuk mengetahui apakah ‘tatanan simbolik’ Lacan juga terjadi dalam proses pembentukan

masyarakat Jepang, perlu diketahui rangkaian peran, ritual, dan tanda yang terdapat dalam tatanan masyarakat Jepang.

2.5.1 Rangkaian ‘Tatanan Simbolik’; Tanda

Tanda merupakan sesuatu yang berkaitan dengan seseorang untuk sesuatu dalam hubungan dan kapasitas tertentu (Peirce, 1990). Hardwick (1990) mendefinisikan tanda sebagai segala sesuatu yang dideterminasi oleh sesuatu yang lain, atau yang disebut sebagai objek, dan mempengaruhi seseorang atau *interpretant*. Suatu ‘tanda’ tidak dapat dikatakan sebagai ‘tanda’ terkecuali ia mentranslasikan dirinya ke dalam ‘tanda’ lainnya yang lebih berkembang dari ‘tanda’ sebelumnya. Terminologi ‘tanda’, telah digunakan di Yunani sejak tahun 130SM, oleh beberapa filsuf dan ilmuwan Yunani seperti Alcmaeon, Hippocrates, dan Galen (Sebeok, 1994: 10).

Ilmu yang mempelajari tentang tanda disebut *semiotika*. Kata *semiologi*, berasal dari bahasa Yunani *semeion* ---yang berarti ‘tanda’---, yang mengajarkan tentang terdiri dari apakah suatu tanda, dan hukum apa yang mengatur tanda. Ada dua filosof ahli semiotika dunia yang terkemuka; Charles Sanders Peirce¹⁹ dari Amerika, dan Ferdinand de Saussure²⁰ dari Swiss. Menurut Saussure, bahasa merupakan sistem linguistik tanda yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan mengenai ‘tanda’ (Culler, 1981: 22)

Menurut Esalawati (2007), walaupun Saussure dan Peirce memiliki asumsi dasar yang berbeda mengenai ‘tanda’, tetapi mereka berdua memiliki kesimpulan

¹⁹ Menurut Peirce, ‘semiotika’ merupakan ilmu dari segala ilmu pengetahuan, karena alam semesta terhubung melalui tanda-tanda. Alam semesta terdiri dari keseluruhan tanda (dan menurut Peirce, laki-laki termasuk ke dalam ‘tanda’). Dalam tulisannya mengenai semiotika, Peirce mengklasifikasikan tanda ke dalam 10 bentuk, yang terdiri dari 59,049 kelas. Kelas tersebut semakin direduksi, dan menjadi 66 kelas (Jonathan Culler, 1981: 23)

²⁰ Pada buku *Course in General Linguistics*, Ferdinand de Saussure menjelaskan bahwa semiologi merupakan ilmu yang mempelajari peran tanda (*sign*) sebagai bagian dari kehidupan sosial. Menurutnya, terdapat tiga terma di dalam semiologi, yaitu: (1) petanda; (2) penanda; dan (3) tanda. Petanda merupakan sebuah konsep yang telah dijatuhkan dalam bentuk material. Penanda merupakan citra akustiknya, yang bersifat spiritual atau non material. Tanda adalah hubungan antara konsep dan citra tersebut (Esalawati, 2007: 16).

yang tidak jauh berbeda. Menurut Saussure, ‘tanda’ juga merupakan norma, bisa diartikan berbagai macam sesuai konteks, melibatkan pengertian yang terbatas dari ‘penanda’ dan ‘tertanda’, serta selalu dideterminasi oleh aturan sosial. Sama halnya dengan Saussure, Peirce juga berkesimpulan bahwa tanda dideterminasi oleh aturan sosial.

Menurut Johnathan Culler, tiap subjek mengekspresikan atau menyatakan pemikiran yang ‘sudah ada dalam ranah ketidaksadarannya’ (Culler, 1981: 33). Dengan kata lain, apa yang ingin dilakukan, dikatakan, dan dipikirkan oleh tiap individu, memiliki dasar pemikiran dari aturan, norma yang ada dalam alam ketidaksadarannya. Hal ini dikarenakan masing-masing dari aturan tersebut, sadar maupun tak sadar, telah memasuki ranah pengetahuan tiap individu melalui proses interaksi individu tersebut dengan kebudayaan yang menaunginya. Sebagai hasilnya, tiap individu pun berlaku menurut apa yang sudah menjadi ‘norma’ atau ‘aturan sosial’ dalam alam pikirannya.

Pada area apapun dalam kehidupan, seseorang mengadaptasi perspektif semiotika untuk memberi gambaran secara eksplisit pengetahuan yang bersifat implisit yang mengatur masing-masing individu dalam suatu masyarakat, agar dapat memahami sikap dan perilaku individu lainnya. Pengetahuan yang bersifat implisit ini tentu saja sudah mengakar kuat dalam norma budaya suatu masyarakat (Culler, 1981: 32).

Norma, merupakan elemen penting yang termasuk ke dalam kategori ‘tanda’. Untuk memahami struktur ‘tanda’ yang mempengaruhi konstruksi perempuan dalam masyarakat Jepang, perlu dipahami apa yang dimaksud dengan norma.

2.5.1.1 Norma sebagai Sistem Tanda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988), norma merupakan aturan dan panduan yang mengikat warga kelompok di masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian atas tingkah laku yang sesuai dan berterima. Dapat diartikan juga sebagai aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.

Masyarakat berkembang dan dibentuk oleh mekanisme psikologi yang berdasar pada analogi laki-laki, sehingga perempuan tidak dapat mengembangkan konsep dan ide mengenai gambaran dirinya sendiri. Dalam dunia primitif maupun modern, ide yang membentuk budaya ---termasuk mengenai perempuan---, juga didesain oleh laki-laki. Gambaran mengenai perempuan yang kita ketahui, merupakan gambaran yang dikreasikan oleh laki-laki dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan ini berkembang dari ketakutan mereka terhadap “ke-Liyan-an” dari perempuan. Hal ini membuktikan bahwa ‘patriarki’ telah berdiri dan kaum laki-laki telah memperlakukan dirinya sebagai norma manusia, dimana perempuan berdiri sebagai “sang Liyan”, sebagai pihak yang inferior.

Dominasi laki-laki mengontrol kelompok subordinat, yang dalam relasi gender adalah perempuan. Pada akhirnya, norma yang dikembangkan secara sepihak oleh laki-laki menjadi aturan dasar yang universal, sehingga mau tak mau perempuan akan menerima konsep dari norma tersebut sebagai suatu yang wajar, dan harus dijalankan, sebagaimana ayah dan ibu mereka, serta masyarakat umum menjalankannya dari waktu ke waktu.

2.5.1.2 Perempuan dalam Norma yang Berlaku di Jepang

Di Jepang, aturan sosial atau norma yang berlaku di masyarakat telah berkembang melalui proses yang panjang. Berawal dari periode kuno, dimana para perempuan masih mendapatkan kebebasan dan norma yang berlaku di masyarakat tidak begitu mengikat, hingga masuknya pengaruh Konfusianis serta Budha yang lambat laun mengakulturasi budaya Jepang dengan sistem patriarki, yang ternyata kemudian justru mengakar kuat dalam tatanan masyarakat Jepang. Dari masa ke masa, norma atau aturan sosial yang berlaku di masyarakat berubah sesuai perkembangan zaman. Oleh sebab itu, pembahasan dalam tulisan ini akan dilakukan secara lebih spesifik, mengarah pada satu jenis aturan sosial yang berkembang pada zaman feodal, dan sangat mempengaruhi kebebasan perempuan serta memberikan gambaran ideal mengenai perempuan tradisional, yakni; aturan yang berkenaan dengan sistem *Ie*.

Menurut Endah H. Wulandari (1992) dalam laporan penelitian; *Perubahan Kedudukan dan Peranan Wanita Jepang dalam Kaitannya dengan Konsep Ie*, kata *Ie* dalam bahasa Jepang memiliki dua arti, yakni; bangunan rumah, dan suatu garis keluarga yang dihitung secara patrilineal (*Dansei Seido*). Menurut Chie Nakane (1970), *Ie* dalam arti kedua ini merupakan suatu perwujudan kebudayaan khas Jepang yang tidak ditemukan di negara manapun di dunia. Sistem *Ie* mempengaruhi seluruh aspek kehidupan orang Jepang, baik itu kehidupan sehari-hari, perkawinan, kepercayaan, cara berpikir, maupun aktifitas pekerjaan. Semua ini sangat terikat dan tidak dapat dipisahkan dari konsep *Ie*. Konsep ini menjadi mapan pada masa *Shogun* - ---pemerintahan militer--- Tokugawa.

Dalam konsep *Ie*, terdapat ‘prinsip keluarga linear’ atau *chokei kazoku* yang tertera dalam hukum perdata lama di bawah Konstitusi Meiji, yang antara lain menyebutkan sebagai berikut:

1. Bagi setiap anggota keluarga, kepentingan *Ie* harus mendapat prioritas utama daripada kepentingan pribadi.
2. *Kachoo* (kepala keluarga *Ie*) mempunyai wewenang yang besar menyangkut berbagai aspek penting dalam kehidupan keluarga, termasuk aspek perekonomian keluarga, hak waris serta pemujaan leluhur.
3. Prinsip hubungan *oyako* (prinsip hubungan bapak dengan anak) lebih dijunjung daripada hubungan suami-istri.
4. *Choonan* (anak laki-laki tertua) mempunyai hak dan peluang yang lebih penting dari *jisannan* (anak laki-laki kedua dan seterusnya).
5. Harkat dan martabat laki-laki lebih diutamakan dari harkat dan martabat perempuan.
6. Perkawinan lebih dianggap sebagai peristiwa penyatuan dua keluarga *Ie* daripada penyatuan individu suami istri, dan perempuan lebih merupakan anak menantu bagi *Ie* ketimbang merupakan istri bagi suaminya.
7. Martabat *honke* (keluarga asal) lebih diutamakan daripada *bunke* (keluarga cabang) (Wulandari, 1992: 3).

Dapat dikatakan, aturan ini merupakan contoh nyata dari bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang terlahir dari keputusan yang dibuat secara sepihak, oleh kaum laki-laki. Sejalan dengan pendapat Wulandari (1992), perempuan diposisikan sebagai ‘warga kelas dua’ dengan mengatasnamakan kepentingan kelompok, dimana hak-hak asasinya ---seperti hak kepemilikan atas barang, sampai hak untuk memuja

leluhur--- berada di bawah kekuasaan laki-laki, yakni suaminya. Aturan ini juga mengedepankan relasi antara ayah dan anak, dan perempuan seolah 'hanya' menjadi aset untuk menjaga keutuhan keluarga serta sebagai alat produksi keturunan yang dapat menjaga keberlangsungan dari *Ie*. Perkawinan lebih dipandang sebagai penyatuan dua keluarga.

Meskipun hal ini memiliki nilai positif ---seperti kesatuan kelompok yang kuat dan menjaga stabilitas kehidupan rumah tangga---, tetapi perempuan tidak mendapatkan hak untuk memilih. Dengan kekuasaan yang berada di tangan kaum laki-laki ---baik ayah, suami, maupun anak laki-laki tertua---, kebebasan perempuan menjadi lebih terbatas.

Saat ini, meskipun masa militerisme feodal sudah lama berlalu dan sistem '*Ie*' dengan keluarga besar di dalamnya telah tergantikan dengan sistem keluarga *nuclear* dengan hanya berisi keluarga inti, peran perempuan sebagai 'ibu' dan 'istri' yang menomori satukan keluarga masih tetap dominan di masyarakat. Di era kontemporer ini, sang ayah bertransformasi menjadi tulang punggung keluarga yang mendukung finansial keluarga dengan bekerja, sedangkan sang ibu memperhatikan kesehatan, pendidikan bagi anak-anak, mengerjakan tugas rumah tangga, serta menjaga keutuhan rumah tangga.

Selain itu, mengingat bahasa juga merupakan sistem linguistik tanda yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan mengenai 'tanda' (Culler, 1981: 22), dapat dilihat bagaimana sistem patriarkal tercermin melalui pemakaian kata dan bahasa dalam huruf Kanji Jepang, yang diadaptasi dari kebudayaan Cina.

Dalam tulisan Kanji Jepang, terminologi yang dipergunakan untuk kata 'istri' sudah memiliki makna yang bersifat marginal. Seperti yang dituliskan oleh Endah Wulandari (1992: 13), terminologi untuk kata 'istri' yaitu *kanai* untuk suami yang menyebutkan istrinya sendiri, serta kata 'istri' *okusan* untuk orang lain yang memanggilnya, menunjukkan arti 'di dalam rumah'.

Terminologi 'ibu' dalam bahasa Jepang yang disebut '*Okaasan*' juga merupakan perwujudan dari simbol cinta dan kasih sayang yang tiada habisnya,

sedangkan terminologi ayah atau '*Otoosan*' merupakan simbol dari otoritas dan disiplin (Iwao, 1993: 126).

Dalam sistem keluarga tradisional Jepang, ayah memiliki otoritas penuh serta penentu keputusan akhir dalam keluarga. Kekuasaan ini tidak dapat dilawan karena ia merupakan akses utama keluarga dengan informasi dari dunia luar, yang merupakan masyarakat umum (Iwao, 1993: 128). Dalam sistem keluarga tradisional, ibu melambangkan kehangatan, cinta dengan pengorbanan diri, pengampunan, dan kekuatan untuk melindungi sang anak. Saat ini pun gambaran tentang ibu masih tetap sama, walaupun pengorbanan diri tidak lagi dilakukan mengingat kondisi ekonomi negara Jepang yang cukup stabil.

Karakter ibu juga menjadi sumber utama yang melahirkan perasaan yang kuat tentang *amae* ---kebergantungan--- yang sesungguhnya masih dibawa oleh orang Jepang hingga dewasa. Kebergantungan emosional pada ibu di masa kecil ditransformasikan pada kebergantungan terhadap istri setelah menikah. Menurut Iwao Sumiko (1993: 127), kemurahan hati dan sikap protektif dari para ibu di Jepang tidak diberikan kepada yang bukan anggota keluarga, bahkan terhadap menantu perempuan. Dalam kebudayaan Jepang, terdapat garis pemisah antara *insider* ---*uchi*; yang juga berarti 'rumah'--- dan *outsider* ---*soto*---. Berbeda dengan teknik perawatan Barat (khususnya Amerika) yang mengutamakan disiplin taktis, dimana ada hukuman yang diberlakukan untuk pelanggaran terhadap aturan yang diterapkan orang tua, teknik perawatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu-ibu Jepang mengaktualisasikan simbol kehangatan dan pentingnya manajemen rumah tangga yang dikendalikan sang ibu, dan membentuk asosiasi yang kuat antara 'rumah' dan 'ibu'.

Norma yang dikendalikan kaum laki-laki sejak masa kekuasaan feodal di Jepang, tidak serta merta hilang di dunia modern ini. Meski kebebasan perempuan telah diraih sejak pasca Perang Dunia II, tetapi kebiasaan, serta aturan yang telah berlangsung selama ratusan tahun, masih mengakar kuat dalam alam bawah sadar masyarakat Jepang. Sosok perempuan yang ideal ---sebagai istri dan ibu yang baik bagi anak-anaknya--- terus diproduksi oleh kaum perempuan Jepang, dan sosok

tersebut tanpa sadar menjadi satu figur yang kuat dalam benak anak-anak mereka, sehingga aturan sosial yang menempatkan perempuan di wilayah domestik, menjadi suatu yang sulit untuk dihilangkan.

2.5.2 Rangkaian ‘Tatanan Simbolik’; Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988), peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Dalam dunia sosiologi, yang dimaksud dengan “peran perempuan” adalah kombinasi dari peran perempuan sebagai istri dan ibu. Atau seringkali disebut sebagai “peran rumah tangga” (Pharr, 1981: 45). Yang menjadi permasalahan adalah, bagaimana cara mengkombinasikan peran ‘domestik’ perempuan tersebut dengan berbagai peran sosial lainnya, yang dalam hal ini adalah peran perempuan di ruang publik, khususnya di bidang politik.

2.5.2.1 Peran Perempuan Jepang dalam Pandangan Tradisional

Dalam masyarakat di masa sebelum perang, khususnya setelah masuknya ajaran Konfusianisme²¹, Budhisme²², dan sistem kepercayaan lainnya baik dari

²¹ Sampai saat ini, Konfusianis masih memegang peranan dalam kehidupan masyarakat Jepang. Latar belakang masuknya pengaruh Konfusianis di Jepang adalah pada fase awal sejarah Jepang, ketika kebudayaan Cina diimpor ke negeri Jepang kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Pemikiran Konfusianis merupakan basis dasar kebudayaan Cina, yang mendasari sistem nilai yang dipergunakan masyarakat, terutama berkaitan dengan politik, intelektual dan aktifitas sosial. Pada periode Tokugawa (1603-1868), pemikiran Konfusianis menyebar hampir di seluruh Jepang, dan menanamkan sistem nilai yang diterima oleh masyarakat luas pada masa itu, karena pada periode Tokugawa, terjadi titik temu antara masalah sosial dan etika di masyarakat dengan Konfusianisme yang dapat memaksimalkan kestabilan di negara feodal (Warren Smith, 1959: ix-x). Meskipun pada masa Meiji, Konfusianisme tidak lagi dapat diterapkan sepenuhnya dalam dunia industrial yang mengadaptasi budaya Barat, tetapi kontras dengan negeri Cina, Konfusianisme dianggap tidak pernah mati meskipun Jepang telah memasuki dunia modern. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Konfusianis menjadi salah satu elemen penting dalam pemikiran tradisional Jepang yang masih diterapkan di masyarakat hingga saat ini. Tradisi Konfusianis telah mengkristalisasi sistem ajaran bagi manusia yang menyebutkan bahwa bumi dan segala yang ada di dalamnya, merupakan subjek dari hukum Surga. Segala aktifitas di muka bumi ini harus selaras dan harmonis dengan hukum Surga, prinsip dasar keadilan, kebaikan, kebahagiaan, dan pemerintah yang merupakan perwakilan dari surga. ‘Laki-laki’, ditempatkan dalam posisi utama di dunia, dimana segala pemikirannya dianggap sebagai manifestasi tertinggi dari aktifitas surgawi, sehingga diwajibkan bagi mereka untuk hidup harmonis dengan hukum surga (Warren Smith, 1959: 2). Smith (1959) juga menulis mengenai ajaran Konfusianis tentang lima hubungan dasar atau *gorin gojo* antara laki-laki dan

daratan Cina ---Taoisme, Shinto--- maupun dari Barat ---agama Kristen, dan sebagainya---, mayoritas penduduk Jepang percaya bahwa perempuan memiliki peran utama sebagai istri dan ibu. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sumiko Iwao (1993), perempuan dan laki-laki dilihat sebagai figur yang secara esensial berbeda. Laki-laki memiliki superioritas dalam berbagai area. Laki-laki mendapat hak yang lebih banyak dari perempuan. Laki-laki memiliki superioritas, dan muncul pula anggapan bahwa perempuan memiliki beberapa keterbatasan yang pada akhirnya membuatnya termarginalisasi. Laki-laki memimpin, membuat keputusan, dan menjadi dasar bagi unit masyarakat, dasar keluarga. Hal yang telah menjadi rantai dalam komunitas; perempuan patuh pada laki-laki, laki-laki patuh pada masyarakat, dan masyarakat tunduk kepada sistem.

Pharr (1981) mengungkapkan bahwa asumsi tradisional tentang perempuan mendefinisikan perempuan dengan mengedepankan tujuan, penghargaan dan prioritas bagi perempuan ---yang sesungguhnya menguntungkan kaum laki-laki---. Bagi

masyarakat yang menjadi esensi dasar harmonisasi dalam segala bidang di dunia. Dalam konsep ini, terlihat dikotomi hubungan, dimana salah satu berada di atas yang lain. Dikotomi hubungan suami-istri dalam *goringoryo*, menjadi gambaran ajaran Konfusianis yang menomorsatukan laki-laki, dan bahwa untuk menjaga harmonisasi dalam kehidupan, sudah menjadi takdir perempuan untuk menghormati dan menaati suami. 'Lima Hubungan Dasar' merupakan filosofi sosial yang dipercaya menjadi sumber dari segala bentuk dan standar masyarakat yang diinginkan (masyarakat utopis). Selain itu, terdapat ajaran yang juga menyebutkan betapa pentingnya laki-laki dalam keluarga yang menjadi pilar penjaga pemerintahan suatu negara.

²² Ajaran agama Budha menyebar dari India ke Cina sekitar 400SM, dan disebarkan ke wilayah Jepang dari Cina melalui semenanjung Korea pada pertengahan abad ke-6. Pada awal zaman pertengahan (*Chuuse*) tahun 1180, dibawah kekuasaan Kamakura *bakufu* (1180-1333), Budhisme berkembang pesat di Jepang dan membawa serta konsep sistem keluarga patriarkal ke dalam masyarakat Jepang (Kozo Yamamura, 1990: 544). Agama Budha di Jepang secara historis telah gagal untuk menempatkan perempuan di posisi yang setara dengan laki-laki. Dalam kitab Budha, *Gosho* ---lima rintangan perempuan--- dan *Sanju* ---tiga kepatuhan perempuan, meliputi mematuhi ayahnya selagi muda; mematuhi suaminya ketika sudah menikah; dan mematuhi anaknya ketika dimasa tua---, merupakan contoh pengajaran yang menggambarkan inferioritas perempuan. Lebih jauh lagi, sampai saat ini perempuan dilarang untuk memasuki kuil Budha atau menginjak tanah dari gunung yang disakralkan (Yukei Matsunaga, 2003: 189). Dalam agama Budha di Jepang, tidak ada instansi yang mengusung problematika perempuan dalam sejarahnya. Masalah perempuan tidak pernah menjadi isu utama dalam kuil-kuil Budha, yang dioperasikan berdasarkan dukungan dari sistem kependetaan, dan dipengaruhi kepentingan dari sistem klan feodal. Agama Budha sendiri, kerap kali merubah cara pandangya terhadap perempuan. Namun setelah periode Kamakura, semakin jelas bahwa ajaran Budhisme memosisikan perempuan tidak sejajar dengan laki-laki, atau dengan kata lain, di bawah dominasi laki-laki.

perempuan muda, mereka dibimbing untuk mempersiapkan diri sebagai istri dan ibu yang baik. Dalam kehidupan perempuan dewasa, tugas domestik menjadi pengutamakan, dan aktifitas yang tidak berkaitan dengan urusan rumah tangga dan kepengurusan anak dinomorduakan.

Masyarakat Jepang sesungguhnya menawarkan peran-peran alternatif bagi perempuan, seperti menjadi *geisha*, penghibur, atau terjun ke dalam industri prostitusi (Pharr, 1981: 47). Karena alternatif pilihan yang tak mudah, mayoritas perempuan Jepang melihat hubungan pernikahan yang permanen sebagai bentuk kepastian keamanan bagi hidup mereka.

Asumsi-asumsi tradisional ini sesungguhnya kerap muncul dalam masyarakat patriarkal di belahan bumi lainnya, tetapi yang berbeda adalah, bentuk perlawanan masyarakat Jepang terhadap asumsi ini dinilai sangat rendah, bahkan hingga pertengahan abad 20. Setelah Jepang berhasil keluar dari politik isolasi di bawah rezim feodal tahun 1860 pun, asumsi ini justru semakin mengakar dalam kebiasaan dan adat masyarakat hingga akhir Perang Dunia II.

Pandangan tradisional Jepang mengenai peran perempuan ini memiliki dampak khusus dalam kehidupan perempuan sebelum Perang dan mempengaruhi sikap perempuan Jepang hingga saat ini. Tiga pandangan yang sangat mempengaruhi perempuan Jepang di antaranya; pertama, adalah pandangan mengenai derajat yang membedakan status laki-laki dan perempuan dianggap sebagai hal yang wajar dan mendapat legitimasi atau diakui secara hukum. Di masa sebelum perang, perempuan menerapkan bentuk perbedaan derajat dalam penggunaan bahasa yang lebih sopan, dan bentuk sopan santun seperti membungkuk lebih dalam saat memberi salam, berjalan dibelakang suami saat di ruang publik, dan sebagainya. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga, terdapat aturan tak tertulis yang mengharuskan sang ibu untuk bangun lebih pagi, pergi tidur paling akhir di malam hari, mandi seusa seluruh anggota keluarga mandi, makan setelah seluruh anggota keluarga makan, dan mendapat kesempatan paling sedikit dalam memilih makanan (Pharr, 1981: 49).

Kedua, bentuk pandangan tradisional yang didukung tidak hanya oleh adat-kebiasaan, tetapi juga aturan hukum yang legal hingga akhir Perang Dunia II, adalah

otoritas suami atas istrinya (Pharr, 1981: 49). Dalam sistem keluarga di masa sebelum Perang, khususnya di masa feodal Jepang, kepala keluarga memiliki tanggung jawab penuh atas seluruh anggota keluarga. Ketika seorang perempuan menikah, ia hanya dapat berlaku secara legal di area publik apabila mendapat persetujuan dari sang suami. Di dalam Kode Sipil tertulis bahwa hak untuk bercerai, menikah, dan kepemilikan barang dan segala yang berhubungan dan hukum keluarga, berada di tangan sang suami. Apabila terdapat permasalahan pasca bercerai mengenai kepemilikan anak, suami yang memiliki otoritas untuk memutuskan. Apabila suami meninggal, hak untuk membuat keputusan jatuh ke tangan anak laki-laki tertua, segera setelah ia menginjak usia dewasa (Pharr, 1981: 50). Sebagian besar perempuan di masa sebelum Perang menjalani kehidupannya dengan bergantung kepada laki-laki yang menjabat sebagai kepala keluarga, baik itu ayah, suami atau anak laki-lakinya.

Ketiga, bentuk pandangan tradisional yang masih mengakar hingga saat ini adalah bahwa suami dan istri memiliki ruang aktifitas yang berbeda (Pharr, 1981: 50). Industrialisasi mendukung spesialisasi peran gender dengan mengeluarkan suami dari unit produktif keluarga ---seperti bertani dan berdagang--- ke unit kantor atau pabrik. Tetapi segregasi terhadap peran berbasis gender yang mempengaruhi pandangan masyarakat hingga saat ini sesungguhnya berasal dari masyarakat kelas atas di masa sebelum Perang. Menurut Pharr (1981), bertolak belakang dengan masyarakat kelas atas di AS dan Eropa, dimana para perempuannya dapat menikmati waktu luang yang lebih banyak, perempuan kelas atas di Jepang pada masa sebelum Perang memiliki aturan yang lebih ketat dan mengarahkan perannya dalam urusan domestik.

Ketiga bentuk pandangan tradisional yang berpenetrasi ke dalam masyarakat turut mendukung pandangan dan penempatan perempuan di dunia politik. Otoritas yang dikuasai oleh laki-laki sebagai pimpinan keluarga, menyulitkan ruang gerak perempuan di area publik.

Seperti yang dikatakan Iwao Sumiko (1993), perempuan Jepang sangat menyadari perannya dalam keluarga, khususnya yang berkaitan dengan *motherhood*; sebagai ibu dan istri yang baik bagi keluarga dan suaminya. Persepsi ini tentu saja lahir melalui proses panjang dan menjadi suatu tradisi yang diterima masyarakat

umum. Setelah menjadi ibu, hidup perempuan adalah untuk mengasuh anak-anaknya, melebihi untuk kepentingan dirinya sendiri. Perempuan dapat menikmati waktu luang, mengerjakan pekerjaan sambilan, atau melakukan hobi yang disukainya, apabila hal-hal tersebut tidak mengganggu fondasi maupun fungsinya dalam keluarga. Dalam sitem *Ie kuno*, anak-anak sangat dibutuhkan untuk meneruskan garis keturunan keluarga dan dipandang sebagai aset keluarga di masa mendatang. Karena tugas untuk melahirkan anak dianggap sebagai tugas perempuan, maka perempuan yang tak mampu memberi keturunan akan diceraikan ---meskipun suaminya mencintainya---, dan sang suami akan mencari istri baru untuk melestarikan garis keturunan keluarga. Walaupun kebiasaan ini sudah lama berlalu, peran perempuan yang diidentikkan dengan perannya sebagai 'ibu' dan 'istri' masih diterima secara luas oleh masyarakat.

Menurut Sumiko Iwao (1993: 13), Ada tiga aspek dalam proses sosialisasi peran gender yang mengakar kuat dalam pengalaman perempuan. Pertama, lingkungan keluarga yang 'toleran' dan dapat mengkreasikan kondisi yang memungkinkan eksperimental terhadap peran gender. Kedua, relasi antara ibu dan anak; karena ketika sang ibu menjadi imitasi dari peran tradisional gender perempuan, sang anak cenderung menirunya. Ketiga, adalah tempat khusus bagi model peran alternatif dalam proses yang telah dideskripsikan, seperti model ayah, atau saudara laki-laki yang mampu memberi pemahaman bagi sang anak perempuan mengenai tata cara berperilaku yang sesuai tatanan sosial. Bahkan, pandangan sang ayah mengenai tata cara berperilaku yang sesuai tatanan sosial dianggap lebih berpengaruh daripada pandangan sang ibu. Hal ini sejalan dengan konsep 'tatanan simbolik' Lacan yang menyebutkan bahwa tatanan masyarakat cenderung mengarah pada 'tatanan ayah'.

Mengapa partisipasi dan peran perempuan Jepang dalam politik nasional terbilang rendah? Hal ini terkait dengan proses sosialisasi peran gender yang mempengaruhi pandangan perempuan Jepang mengenai peran politik. Dengan gambaran perempuan yang dilekatkan dengan peran domestik, *motherhood*, serta menjadi simbol dari cinta dan kasih sayang, prioritas sebagian besar perempuan

Jepang tentunya berkisar pada keluarga; kepengurusan suami, pendidikan anak, kesehatan dan kesejahteraan keluarga serta lingkungan. Peran politik dianggap sebagai peran ‘laki-laki’ sebagai pemimpin dan penentu keputusan.

2.5.3 Rangkaian ‘Tatanan Simbolik’; Ritual

Ritual merupakan salah satu aspek dalam kesatuan sosial, yang menjelaskan bagaimana nilai dari berbagai elemen di dunia sosial dapat ditransformasikan dalam simbol, kategori, mekanisme, dan dalam beberapa konteks tertentu, mengacu pada bentuk acara khusus atau tidak biasa (Bremen, 1995: 3). Barbara Myerhoff (1977: 200) menyatakan bahwa ritual tidak sesederhana sebagai hal yang dianggap sakral atau sekuler ---tidak sakral---

Ritual, seringkali dikaitkan dengan hal yang sakral, serta berasosiasi dengan dunia supranatural maupun arwah, tetapi sebagian ritual juga dekat dengan hal yang bersifat duniawi, berkenaan dengan moral, kebenaran, dan relasi antar manusia. Menurut para arkeologis, ritual memang dianggap sebagai mekanisme atau semacam sikap yang dioperasikan dalam segala bidang di kehidupan sosial (Partridge, 1977: 61-62). Ritual, sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan praktik-praktik sosial lainnya, dan memiliki kemiripan dengan upacara. Da Matta (1977: 255) menyebutkan bahwa ritual merupakan kesatuan yang konsisten dengan dunia umum, masyarakat, dan merupakan elemen dari kehidupan sehari-hari yang konsisten.

Para antropologis mengkategorikan ritual ke dalam beberapa bentuk: upacara, festival, selamat, penampilan, serta liburan (Bell, 1992: 69-70). Mereka juga membagi ritual menurut sifat dasarnya ---religius, sekuler, personal, komunal, musiman, kenegaraan, interaktif, sipil, pemakaman, dan sebagainya---, serta menurut sifat kebendaannya ---solidaritas, masa kanak-kanak, inisiasi, perkawinan, pengorbanan, dan sebagainya--- (Da Matta, 1977: 256). Dapat dikatakan ‘ritual’ memiliki peranan yang dominan dalam dunia sosial, serta dapat dimengerti, dihilangkan, atau diklasifikasikan. Karena dunia sosial berdasar pada konvensi dan simbol-simbol, segala aksi sosial merupakan aksi ritual dan tumbuh dari ‘ritualisasi’ (Bremen, 1995: 9).

Catherine Bell (1992: 107) juga menyatakan bahwa ritual sesungguhnya bukan sesuatu yang serta merta tercipta, tetapi merupakan praktik yang eksis, hanya dalam bentuk-bentuk kebudayaan tertentu, dan strategi untuk mengaktualisasi ritual dengan ritualisasi diterima oleh tiap orang dari komunitas budaya tertentu.

Dalam sebagian besar ritual, diperlukan sekelompok orang dan bentuk dari aksi yang terkoordinasi, yang menjadi acuan dari aksi ritual individu (Bremen, 1995: 9).

Di Jepang sendiri, dikatakan oleh Robert Smith (1988: 4-6) bahwa yang terjadi adalah setiap individu mempelajari *bagaimana* segala sesuatu terjadi, daripada *mengapa* sesuatu terjadi, sehingga yang menjadi titik beratnya bukan mengenai rasio, melainkan hal yang dipelajari kaum muda dari generasi sebelumnya, hingga pada akhirnya ritual dapat berlangsung terus menerus dan terjaga kelestariannya.

Masyarakat terkadang tidak mementingkan apa sesungguhnya 'sesuatu' yang dikerjakan, apa maksud dari 'sesuatu' yang ia lakukan, maupun mengapa 'sesuatu' tersebut dilakukan. Hal ini yang mendasari pengetahuan ritual di masyarakat lokal, yang disebut juga sebagai '*pragmatic meaning*' (Martinez, 1995: 10). Selain itu, faktanya, aksi kelompok tidak dapat dihilangkan serta merta melalui aksi individu. Tidak hanya di Jepang, pada umumnya terdapat banyak kasus dimana masyarakat tidak tahu dan tidak mempertanyakan mengapa mereka melakukan ritual tertentu. Walaupun pada beberapa ritual terdapat penjelasan secara tradisi, tetapi tradisi itu sendiri acapkali merupakan bagian dari ritual. Ritual hanyalah salah satu aspek dalam kehidupan sosial, dan salah satu bentuk dari aksi simbolik (Bremen, 1995: 10). Ritual juga dapat dipelajari dan lintas bahasa, budaya, serta wilayah.

Ritual merupakan bentuk kontrol sosial yang penting dan efektif, berlaku hanya pada sebagian tipe masyarakat, yang lebih dekat dengan bentuk hierarkis. Hal ini menandakan relasi interpersonal yang bersifat subordinat sesuai dengan permintaan peran atau posisi. Kelompok menjadi bentuk kesatuan yang lebih tinggi dari kepentingan individu (Bell, 1992: 178). Di Jepang, sistem ritual juga tidak berfungsi sebagai regulator atau untuk mengontrol sistem relasi sosial ---karena ritual juga merupakan sistem--- sehingga dapat dikatakan, ritual bukanlah refleksi dari

relasi sosial, tetapi mengkoordinasikan aktifitas yang secara terus menerus, berintergrasi dan berubah, mendirikan atau melemahkan lapangan dari relasi sosial (Bell, 1992: 130).

2.5.3.1 Perempuan dan Ritual di Jepang

Menurut Martinez (1995: 183), perlu digarisbawahi bahwa segala sesuatu berubah, bukan hanya pelaku saja yang berubah, tetapi masyarakat juga berubah. Untuk mengerti hal yang terjadi di masa kini, kita perlu mencermati hal yang terjadi di masa lalu. Untuk memahami ritual di Jepang, kita perlu memahami struktur dari kekuasaan dan pengetahuan, uchi (*insider*) dan soto (*outsider*), juga faktor usia dan gender.

Sesungguhnya, untuk mendapatkan model teoritikal mengenai perempuan dan ritual bukanlah hal yang mudah, meskipun pada banyak negara, seperti negara-negara Afrika, Nepal, Korea, termasuk Jepang, perempuan memiliki cukup banyak andil dalam prosesi ritual (Martinez, 1995: 184). Menurut para feminis, hal ini disebabkan karena laki-laki ingin menjaga dominasinya dalam ritual ortodoks, sehingga perempuan diposisikan di ‘tempat yang seharusnya’ (Ranke-Heineman, 1990). Hal ini merupakan bentuk marginalisasi perempuan dan kontrol terhadap seksualitas perempuan.

Dalam kasus Jepang, sangat penting untuk memahami sejarah keikutsertaan perempuan dalam agama, yang cukup kompleks, dan menggambarkan esensi keberadaan perempuan dalam masyarakat. Menurut Pat Holden;

Perempuan seringkali diidentikkan dengan lingkup domestik, dan terkadang dalam beberapa kasus disebut sebagai bentuk ‘penjagaan’; dan meskipun mereka diperbolehkan untuk memasuki ruang publik, mereka ‘disembunyikan’, agar seksualitas mereka tidak membahayakan, dan hal ini juga mengekang kebebasan mereka. Pada beberapa kasus, perempuan tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam ritual publik yang penting; mereka mungkin seringkali dikaitkan dengan ritual yang berkenaan dengan penyembuhan, atau pemanggilan arwah, tetapi hal ini dapat dilihat sebagai perpanjangan dari peran tradisional perempuan...

Laki-laki, di sisi lain, memiliki peran penting dalam organisasi keagamaan; mereka melaksanakan berbagai ritual penting, memformulasikan dogma, dan berperan

penting dalam menuliskan teks-teks agama yang sakral (wahyu Tuhan). (Pat Holden, 1983: 2)

Walaupun tidak dapat dipungkiri, bahwa perempuan juga merupakan bagian penting dalam terminologi simbolik agama, tetapi adalah fakta bahwa penggunaan dan kreasi dari bentuk-bentuk simbolis yang dipergunakan oleh agama berada di tangan kaum laki-laki. Meskipun status perempuan dalam religi juga dinomorduakan, tetapi mereka juga merupakan bagian yang esensial dalam sistem religi, dan untuk mengerti mengenai keseluruhan agama, kita juga perlu memandang peran perempuan di dalamnya.

Dalam ideologi Budha di Jepang, terdapat penurunan status perempuan dan peningkatan dominasi laki-laki (Paulson 1976), walaupun pada masa sebelumnya, --- pada periode Jepang kuno--- perempuan juga dapat meraih posisi tertinggi; sebagai dewi tertinggi Amaterasu. Memang tidak dapat dielakkan bahwa kehadiran Konfusianis, dan agama Budha, dikombinasikan dengan kepercayaan Shintoisme, mendekatkan Jepang pada pandangan feodalistik (Ackroyd, 1957).

Dalam ritual Budha maupun Shinto, terdapat ekspresi dari pembentukan struktur dalam komunitas. Pada umumnya, ritual Shinto menggambarkan lingkaran kehidupan ---seperti ritual kelahiran, ritual perkawinan---, sedangkan ritual Budha menggambarkan lingkaran kematian (Ooms, 1976). Dapat dikatakan bahwa ritual di Jepang memberi gambaran pada tiap individu mengenai bagaimana sikap yang baik dalam bersosialisasi di dalam masyarakat, dimana di dalamnya terdapat struktur yang menjadi bagian dari pembentukan masyarakat hierarkis, harmonis dan kooperatif (Martinez, 1995: 187).

Perempuan dalam ritual di Jepang seringkali dianggap memainkan peranan penting, tetapi sesungguhnya hal tersebut dapat terjadi karena kuasa laki-laki. Perempuan menjadi 'pelaku' seolah-olah untuk dirinya, tetapi di sisi lain hal ini memberikan kemudahan bagi kaum laki-laki. Contohnya dalam ritual yang dilakukan di dalam rumah. Seperti yang diungkapkan oleh Martinez (1995), ritual di dalam rumah dilakukan oleh seluruh anggota keluarga; anak-anak membantu membuat bendera dengan nama keluarga mereka untuk menghiasi altar Budha (*butsudan*)

ketika diadakan festival musim panas, tetapi hanya anak laki-laki tertua yang memiliki peran utama dalam ritual publik bagi para leluhur (*bon*). Laki-laki sebagai kepala keluarga, tidak begitu banyak berperan dalam ritual yang dilakukan di dalam rumah, tetapi hal itu pula yang menyebabkan tugas-tugas berat ritual ini jatuh ke tangan perempuan, meliputi memberi persembahan pada dewa-dewa Shinto, yang biasanya dilakukan di dapur, serta bagi perempuan yang lebih tua ---nenek, atau perempuan yang berusia sekitar 40-63 tahun--- memberi persembahan bagi para leluhur.

Adalah hal yang penting untuk melihat kembali bagaimana hubungan antara perempuan dan ritual, yang menggunakan faktor usia sebagai penanda hubungan dengan apa yang dilakukan perempuan dalam memenuhi tugas-tugasnya dalam ritual tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan Martinez (1995: 192) dalam studinya di desa Kuzaki, perempuan tidak dapat melakukan suatu hal yang dianggap penting ---khususnya yang berhubungan dengan ritual--- hingga ia menikah. Perempuan yang tinggal di desa tersebut dapat dikatakan sebagai 'orang lain'; bila mereka baru menikah, maka mereka masih dianggap 'orang lain' sampai melahirkan anak, khususnya anak laki-laki pertama. Setelah memiliki anak, para perempuan di wilayah ini pun tidak serta merta menjadi bagian penuh dari keluarga (suami), sampai ia mendapatkan menantu, yang menggantikan posisinya dalam melaksanakan berbagai kewajiban rumah tangga. Sebagai ibu, perempuan harus menjadi mediator dalam berhubungan dengan dewa-dewa Shinto untuk mendapatkan keberuntungan, kesehatan, serta perlindungan bagi seluruh anggota keluarga. Yang patut digarisbawahi adalah hubungan dalam ritual antara perempuan dan para leluhur, karena walaupun perempuan dapat menyiapkan sesaji untuk para leluhur, tetapi ia baru dapat belajar untuk mengucapkan *sutra* (*nenbutsu*) ketika ia menginjak usia sekitar empat puluh tahun, pada saat ia sudah memiliki menantu.

Seperti yang diungkapkan Takie Sugiyama Lebra (1984), semakin perempuan menjadi dewasa, mereka semakin menjadi bagian dari keluarga, dan setelah mereka meninggal, mereka akan menjadi bagian dari leluhur keluarga suami. Bahkan setelah beranjak tua, para perempuan semakin mendapatkan posisi yang dominan dalam

ritual-ritual publik. Dengan ini konsep patriarkal yang kuat terbentuk dalam konsep ritual perempuan Jepang.

Menurut Martinez (1995), dalam ritual-ritual publik, seperti upacara Shinto pada tanggal 1 Juli, laki-laki mendapatkan peran utama dalam upacara agama, dan tiap laki-laki dengan kelompok umur tertentu memainkan peran spesifik dalam upacara tersebut, sedangkan perempuan menyiapkan makanan bagi masyarakat yang mengikuti upacara tersebut. Meskipun contoh ini tidak dapat menjadi generalisasi dalam keseluruhan ritual yang ada dalam masyarakat Jepang, tetapi hal ini cukup memberi gambaran bagaimana kaitan perempuan dan ritual di Jepang. Pada akhirnya peran perempuan dikonstruksi oleh para pemegang kuasa di masyarakat, yang dalam hal ini adalah laki-laki. Sebagai gambaran umum mengenai hubungan antara perempuan dan ritual di Jepang, dapat dikatakan bahwa perempuan memegang peranan penting dalam ritual yang berkenaan dengan penjagaan dan perlindungan keluarga.

Apabila laki-laki dapat mengambil peran dalam ritual-ritual publik serta ritual dalam komunitas-komunitas tertentu, yang memiliki nilai politis maupun agamis, perempuan masih bergerak di area yang sama, dan masih mendapatkan stigma yang sama; memiliki kekuatan yang dianggap berbahaya, dan 'hanya' berperan dalam ritual yang berhubungan dengan kesehatan, kesejahteraan keluarga, serta pemujaan terhadap leluhur keluarga.

Dalam tradisi Shinto ---dari sisi sejarah--- perempuan memiliki kekuatan sebagai mediator, sebagai penghubung dengan dewa-dewa Shinto, dimana hubungan ini dianggap berbahaya sekaligus penting sebagai penanda kesuburan. Di sisi lain, perempuan seringkali dianggap 'kotor' sehubungan dengan kondisi biologisnya yang mengalami menstruasi, tetapi apabila ia tidak mampu untuk menghasilkan keturunan atau tidak menikah, maka ia dianggap telah dirasuk oleh roh jahat, atau setelah meninggal, dapat dianggap sebagai iblis (Yoshida & Ueda, 1968). Pada level mikro, contohnya dalam ritual di desa Kuzaki, prefektur Mie, laki-laki ---yang sudah menginjak usia tertentu--- memiliki kekuatan untuk mengkreasikan, melindungi dan memberi arti pada desa yang dikuasainya.

Ritual nyatanya menjadi salah satu media dalam pembagian peran gender. Meskipun perempuan yang melaksanakannya mungkin tidak berberat hati atau tidak merasa dibebani, tetapi tidak dapat dipungkiri, bahwa sistem ini juga dikonstruksi oleh kaum yang dominan; laki-laki. Khususnya, apabila melihat kembali proses sejarah dan masuknya agama di Jepang, terlihat bahwa doktrin-doktrin yang berkembang di masyarakat mengacu pada pembentukan masyarakat patriarkis. Perempuan semakin didorong keluar dari wilayah 'tatanan simbolik' yang berdasar pada 'tatanan ayah', dan sadar maupun tidak, mereka tidak memiliki peran-peran yang vital dalam ritual-ritual publik, sampai mereka dapat memenuhi suatu ketetapan tertentu ---misal; usia---

Jepang ternyata menjadi negara yang menggunakan sistem keluarga patriarki yang cukup kuat, dan masyarakatnya, ternyata memiliki relasi yang erat dengan apa yang dikatakan Jacques Lacan sebagai 'tatanan ayah'. Meskipun ketiga 'tatanan simbolik' Lacan yakni tanda, peran dan ritual tidak saling berhubungan dalam pembentukannya, tetapi ketiga 'tatanan simbolik' tersebut dapat dikatakan berlaku dalam sistem masyarakat Jepang, dan memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan karakter dan pola pikir masing-masing individu, sehingga apa yang disebut 'tatanan ayah', menjadi suatu hal yang diproduksi secara terus menerus. Bagi perempuan Jepang, hal ini tentu saja mempersulit posisinya untuk aktif di dunia publik, dan hal ini juga menjadi latar belakang rendahnya peran perempuan Jepang dalam politik.